



PEMAKNAAN SIMBOLIK ATAS PENGUKURAN NILAI ASET INFRASTRUKTUR

Syarif Syahrir Malle¹, Veronika Sari Denka², Muhammad Disyacita Tosa³

^{1,3}UIN Alauddin Makassar

²Politeknik Bosowa

syarif71@gmail.com, veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id,

muhammaddisyacita@gmail.com

INFO ARTIKEL

JIAP Volume VIII
Nomor 2
Halaman 328-340
Samata,
Juli-Desember 2022

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
11 Oktober 2022
Tanggal Revisi:
12 Desember 2020
Tanggal Diterima:
27 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemaknaan interaksionisme simbolik dalam melakukan penetapan metode penilaian aset infrastruktur dalam mendukung kewajaran laporan keuangan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kritis dengan unit analisis Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dukungan data sekunder lainnya. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif. Hasil penelitian menemukan instansi telah melakukan metode penilaian dengan tepat dan benar. Penilaian aset infrastruktur menggunakan biaya perolehan, tetapi pada aset tanah penilaian dilakukan dengan nilai wajar. Penyimbolan dilakukan melalui tiga aspek analisis yaitu sintaktik, semantik dan pragmatik. Metode dengan penyimbolan ini memberikan manfaat bagi para pengguna dan mendukung kewajaran laporan keuangan sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Kata Kunci : aset inrastruktur, metode penilaian, penyimbolan, semiotika akuntansi

This study aims to determine the meaning of symbolic interactionism in determining the method of evaluating infrastructure assets in supporting the fairness of financial statements. This qualitative research uses a critical approach to the analysis unit of the Makassar City Public Works Department. Methods of collecting data with interview techniques and other secondary data support. The data analysis technique refers to the interactive model. The results of the study found that the agency had carried out the assessment method correctly and correctly. The valuation of infrastructure assets uses cost, but the valuation of land assets is carried out at fair value. Symbolization is done through three aspects of analysis, namely syntax, semantics and pragmatics. This symbolizing method provides benefits for users and supports the fairness of financial statements so that they get an unqualified opinion from BPK.

Keyword: *infrastructure assets, valuation methods, symbolization, accounting semiotics*

Copyright: Malle, S. Syahrir. Veronika Sari Denka, & Muhammad Disyacita Tosa. (2022). Pemaknaan Simbolik Atas Pengukuran Nilai Aset infrastruktur. Vol. VIII No. 2 (328-340). <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.32232>

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di era millennium ini sangat pesat, dimana setiap negara bersaing untuk pembangunan di negaranya. Tak banyak negara yang mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli aset untuk mendukung pembangunan negaranya. Aset penghidupan merupakan aset yang ternilai maupun yang tidak ternilai berupa materi maupun sosial yang dipergunakan manusia untuk menyelenggarakan penghidupan (Krantz, 2001). Dalam menyelenggarakan penghidupan, aset yang dibutuhkan tidak hanya satu macam. Untuk itu akan diperlukan kombinasi aset-aset yang ada supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis aset yang lebih bermanfaat atau mendukung bagi penghidupan seseorang adalah berbeda-beda pada tiap individu.

Aset penghidupan dapat digambarkan dalam bentuk pentagon. Pentagon yang terbentuk dari aset tersebut menunjukkan variasi seseorang atau masyarakat dalam mengakses aset. (K. et al., 2005) mengidentifikasi aset dalam 3 skala, yaitu pada level keluarga, masyarakat dan negara. Pada level keluarga dipilih indikator untuk menilai bagaimana suatu produk berkontribusi pada aset keluarga. Pada level masyarakat indikator yang digunakan adalah bagaimana pengaruhnya terhadap aset masyarakat secara umum. Pada level nasional indikator yang digunakan misalnya pendapatan dari ekspor, serapan tenaga kerja maupun pendapatan dari pajak. Aset penghidupan adalah faktor penting yang perlu diungkap dan dipahami dengan tepat karena setiap sumberdaya memiliki karakteristik dan daya dukung yang berbeda bagi penghidupan setiap individu dan masyarakat. Dengan mengetahui level akses aset yang digunakan maka akan dapat ditentukan tindakan selanjutnya untuk menyusun strategi penghidupan sehingga tujuan penghidupan dapat tercapai.

Menurut Hindrawan, dkk, (2006: 119) siklus hidup fisik dari suatu aset atau kelompok aset memiliki empat fase, yaitu perencanaan, pengadaan (acquisition), operasi dan pemeliharaan, serta penghapusan (disposal). Fase perencanaan adalah fase identifikasi kebutuhan yaitu ketika ada permintaan atas aset. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini diselingi dengan pembaruan, pergantian atau perbaikan secara periodik atas aset yang rusak. Fase penghapusan (disposal) dilakukan ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang. Arti kata Manajemen Aset pada dasarnya adalah suatu tindakan pengelolaan aset, agar aset tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil mungkin dan aset tersebut jangan sampai punah, kecuali memang sebaiknya harus dimusnahkan atau dihapuskan (Aryani Soemitro & Suprayitno, 2018).

Aset infrastruktur adalah kategori sektor publik yang penting. Aset ini meliputi jalan raya dan aset jaringan lainnya. Aset ini sering memiliki nilai

yang sangat tinggi, dan sering menjadi tanggung jawab pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Isu-isu utama dari aset infrastruktur yang dapat diidentifikasi dari beberapa literatur sebagaimana uraian Blondal (2003) adalah, pertama, bagaimana dampak dari umur ekonomis yang sangat panjang dalam menentukan metode penyusutan yang sesuai. Dalam konteks ini, ada contoh kasus dimana aset tersebut tidak didepresiasi, melainkan hanya menyatakan bahwa aset tersebut dipertahankan sedemikian rupa. Kedua, isu berkaitan dengan pengakuan aset infrastruktur yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk belanja pemeliharaan atas aset tersebut, di mana pengeluaran ini sering diabaikan oleh pihak pemerintah. Ketiga, seringkali sangat sulit untuk memperkirakan biaya akuisisi asli dari aset tersebut jika metode biaya perolehan digunakan. Hal ini baik karena usia tua dan kesulitan dalam memisahkan investasi awal dan biaya pemeliharaan. Keempat, adalah isu berkaitan dengan pemilihan metode penilaian (biaya perolehan vs nilai saat ini) memiliki dampak yang sangat tinggi atas aktiva tersebut.

Dengan melihat pengertian aset infrastruktur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aset infrastruktur tergolong dalam aset tetap sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang didalamnya membahas mengenai aset tetap yang diklasifikasikan sebagai berikut yaitu; tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Melihat golongan dari aset infrastruktur ini, maka aset bersejarah juga dapat dimasukkan kedalam kategori aset infrastruktur karena termasuk dalam ciri-ciri aset infrastruktur. Seiring dalam perkembangannya, masih banyak golongan yang termasuk dalam aset infrastruktur yang belum diukur sebagaimana mestinya dan belum dimasukkan kedalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya golongan aset infrastruktur yang belum bisa diukur secara pasti. Ini dilihat dari pengukuran yang digunakan dalam pengukuran nilai aset infrastruktur yaitu biaya perolehan atau nilai saat ini. Adapun titik permasalahannya berada pada metode penilaian yang digunakan dalam pengukurannya. Manajemen Aset diwujudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pengelolaan (Rahman & Widiasanti, 2019).

PSAK No. 16 Tahun 2015, mengatakan bahwa aset tetap diukur menggunakan biaya perolehan dan dapat diakui jika biaya perolehan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari asset tersebut. (Masipuang et al., 2015) mengutarakan perolehan aset tetap meliputi agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset, dan pengeluaran-pengeluaran lain agar siap untuk

digunakan. (Kirana, n.d.) (2013) mengatakan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. Biaya perolehan ini mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk digunakan.

Menurut Harahap (1999: 25) perolehan aset tetap melalui pembelian tunai yaitu aset yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian itu ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian aktiva tetap itu, dikurangi potongan harga yang diberikan baik karena pembelian dalam partai besar maupun karena pembayaran yang dipercepat. Prinsip biaya mengharuskan aset tetap dicatat pada harga perolehannya. Dimana harga perolehan itu mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva sehingga aktiva tersebut siap digunakan.

Depresiasi atau penyusutan adalah semua aktiva tetap, kecuali tanah akan menyusut. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat pengalokasian beban penyusutan yang merupakan pemindahan dari akun aktiva ke akun beban (Soemarso, 2005: 125). Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Metode penyusutan aset yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Dalam metode garis lurus (Straight Line Method) lebih melihat aspek waktu daripada aspek kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi (Mulyadi, 2001: 284).

Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam prakteknya disebabkan kemudahannya dan secara koseptual merupakan prosedur yang paling sesuai untuk menghitung penyusutan aset. Pembangunan infrastruktur adalah alat untuk mendukung keberlanjutan tujuan negara dan memiliki peran penting. Namun ada kendala untuk mencapai tujuan negara, kendala utamanya adalah kendala anggaran pemerintah, sehingga perlu dikolaborasikan dengan pihak swasta. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab metode penilaian yang tepat untuk aset infrastruktur.

Teori yang menjelaskan fenomena perbedaan penilaian adalah teori interaksionisme simbolik. Sebagai pengantar tentang Teori Interaksi Simbolik, maka harus didefinisikan terlebih dahulu arti dari kata “interaksi” dan “simbolik”. Menurut kamus komunikasi (Effendy, 1989: 184) definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat, dan definisi simbolik (Effendy, 1989: 352) adalah bersifat melambangkan sesuatu. Simbolik

berasal dari bahasa Latin “Symbolic(us)” dan bahasa Yunani “symbolicos”. Dan seperti yang dikatakan oleh Susanne K. Langer dalam Buku Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Mulyana, 2008: 92), dimana salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang, dimana manusia adalah satu-satunya hewan yang biasanya menggunakan dengan cara lambang. Ernst Cassirer dalam Mulyana (2008: 92) mengatakan bahwa keunggulan manusia dari makhluk lain adalah keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum.

Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Model analisis dengan teori ini merupakan salah satu model metodologi penelitian kualitatif berlandaskan pendekatan fenomenologik. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan pilihan seperti halnya simbol yang dimaknai berbeda oleh masing-masing individu begitupun mengenai akuntan publik. Situasi (simbol berupa fenomena perbedaan pilihan) tersebut sebagai sesuatu yang wajar saja terjadi jika terdapat kondisi dimana pengguna laporan keuangan tidak memahami fungsi atau peranan dan tanggung jawab akuntan publik dan juga tergantung bagaimana akuntan memahaminya. Simbol tergantung hasil kesepakatan yang disetujui meskipun kesepakatannya salah (Yulianti, 2015). Mead mengambil tiga konsep kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik. Tiga konsep itu dan hubungan di antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, sekaligus key words dalam teori tersebut. Interaksionisme simbolis secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektivitas.

(Macintosh et al., 2000) berpendapat bahwa banyak simbol akuntansi yang tidak memiliki rujukan secara jelas pada objek dan peristiwa nyata, sehingga akuntansi tidak secara penuh menjalankan fungsinya sesuai logika representasi, pertanggungjawaban, atau penyajian informasi ekonomik secara transparan. Berbeda dengan (Macintosh et al., 2000), tetapi dengan substansi yang sama, (Mattessich, 2003) menyatakan bahwa semua simbol akuntansi – kata dan angka – selalu memiliki relasi dengan realitas referensialnya, hanya saja realitas referensial dari simbol-simbol akuntansi tersebut mungkin berada pada tingkatan yang berbeda-beda.

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut; (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindahpindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dengan metode penilaian yang tepat. Dari uraian latar belakang diatas, penelitian

ini bertujuan ingin mengetahui pemaknaan interaksionisme simbolik dalam melakukan penetapan metode penilaian aset infrastruktur dalam mendukung kewajaran laporan keuangan. Kebaruan penelitian ini pada pendekatan penelitian yang dilakukan, penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji studi kasus pendekatan deskriptif misalnya Wilestari dan Afriani (2019); Mayangsari dan Nurjanah (2018); Punusingon, et.al (2018); Kurniati, et.al (2017); dan Andrei, et.al (2017), sedangkan penelitian ini mencoba mengungkap realitas menggunakan paradigma kritis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Pendekatan kritis secara ontologi berpandangan bahwa realitas yang teramati (*virtual reality*) merupakan realitas “semu” yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi politik. Sedangkan secara etimologis, pendekatan kritis memahami hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti selalu dijumpai oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan value mediated findings dan dalam pandangan axiologis, pendekatan kritis percaya bahwa nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Pendekatan kritis dalam penelitian ini menggunakan kajian kritis dari (Macintosh et al., 2000) yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rana empiris.

Lokasi penelitian pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dasar pemilihan lokasi dikarenakan dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi menangani masalah aset infrastruktur pemerintah kota Makassar. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana metode penilaian aset infrastruktur pada kantor tersebut dan apa yang menjadi alasan pengungkapan menggunakan metode tersebut. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan didukung oleh dokumen sekunder, diantaranya laporan keuangan Tahun 2021 dan dokumen lainnya terkait profil dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK Nomor 16 mengatakan bahwa suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan biaya pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan (PSAP BA No. 7 Paragraf 28 PP No. 71 Tahun 2010). Dalam PSAK No. 16 (IAI, 2008:16) setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut (Rosiana & Tianna Solovida, 2012) dengan menggunakan model ini total nilai perolehan atas suatu aset tidak akan berubah selama tidak ada transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut.

Transaksi yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset tetap antara lain pembelian, penjualan, penghapusan, pertukaran aset tetap, dan perbaikan aset tetap. Jadi, nilai perolehan aset tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan. Hasil wawancara dengan Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:

“Nilai perolehan adalah nilai yang didapat dari biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya umum, dan berapa nilai kontrak. Itu semua digabung menjadi satu, lalu dibagi secara profesional untuk mendapatkan berapa nilai perolehan. Kalau misalnya ada satu kegiatan, itu hanya satu biaya perencanaan, atau biaya perencanaan hanya diperuntukkan untuk satu kegiatan itu maka tidak perlu dibagi secara profesional langsung diambil saja berapa nilainya”.

Menentukan metode penilaian yang ingin digunakan pada asset infrastruktur dapat melihat standar akuntansi yang berterima umum. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjelaskan bahwa aset tetap diukur menggunakan metode penilaian biaya perolehan. Melihat dari standar tersebut, secara otomatis asset infrastruktur juga menggunakan metode penilaian biaya perolehan. Hal ini dikarenakan asset infrastruktur merupakan bagian dari aset tetap. Metode penilaian biaya perolehan pada asset infrastruktur semakin diperjelas dengan adanya pengakuan dari dinas yang menjalankan asset infrastruktur itu sendiri, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Penilaian asset infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum menggunakan metode biaya perolehan, pengakuan ini dibuktikan dari hasil

wawancara pada dinas tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:

“Tanah diukur menggunakan nilai wajar. Tapi yang mengukur nilai wajar itu bukan kami ada memang KJPP yang akan melakukan itu. Kalo untuk konstruksi jalan yang baru kita menggunakan nilai perolehan tapi untuk konstruksi yang tidak ditau menggunakan nilai wajar yang dinilai oleh KJPP. Jadi metode penilaian yang dilakukan untuk jalan itu menggunakan biaya perolehan”.

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran nilai wajar dalam instansi tersebut dilakukan oleh Konsultan Jasa Penilai Pulik (KJPP). Penilaian dapat diukur dengan merujuk pada suatu teori, oleh karena itu teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik. Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Model analisis dengan teori ini merupakan salah satu model metodologi penelitian kualitatif. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan pilihan seperti halnya simbol yang dimaknai berbeda oleh masing-masing individu begitupun mengenai akuntan publik. Situasi (simbol berupa fenomena perbedaan pilihan) tersebut sebagai sesuatu yang wajar saja terjadi jika terdapat kondisi dimana pengguna laporan keuangan tidak memahami fungsi atau peranan dan tanggung jawab akuntan publik dan juga tergantung bagaimana akuntan memahaminya. Simbol tergantung hasil kesepakatan yang disetujui meskipun kesepakatannya salah (Yuliati, 2015).

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan social (Mulyana, 2002).

Berdasarkan pada penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa simbol-simbol yang berkaitan dengan aset infrastruktur terdiri dari beberapa simbol. Pertama simbol yang berkaitan dengan aset infrastruktur itu sendiri yang berupa tanah, irigasi, jalan dan jaringan. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sobur (2004) yang memasukkan aspek fisik sebagai bagian dari interaksi simbolik. Selain simbol berupa aspek fisik, aspek angka dan kata yang tertuang dalam

laporan keuangan pemerintah kota makassar juga merupakan bagian dari penyimbolan akuntansi. Penyimbolan akuntansi berupa angka dan kata yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah makassar sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mattessich, 2003) yang menyatakan bahwa angka dan kata merupakan simbol dalam akuntansi. Adapun penyimbolan yang berupa angka dan kata yang ada dalam laporan keuangan pemerintah kota makassar didapatkan dari hasil pengukuran aset infrastruktur, baik pengukuran yang dilakukan melalui nilai wajar maupun harga perolehan.

Metode penilaian aset tetap pada umumnya menggunakan metode biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada aset infrastruktur menggunakan metode penilaian yang sama dengan aset tetap, hal ini dikarenakan aset infrastruktur merupakan bagian dari aset tetap. Dalam Dinas Pekerjaan Umum, metode penilaian yang digunakan dengan cara biaya perolehan. Namun, pada aset tertentu menggunakan metode penilaian nilai wajar dalam hal ini aset tanah. Penggunaan metode di atas dirasa tidak efisien jika harus menilai menggunakan satu metode terdahulu lalu menggunakan metode penilaian lain jika tidak dapat dinilai.

Akuntansi memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Informasi bisa tersampaikan terhadap pengguna bila pesan yang ada disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol yang diungkapkan dalam bentuk bahasa yang tepat. Sintaktik merupakan bagian dari analisis semiotik dalam akuntansi. pada tataran sintaktik (konsep), aset infrastruktur dipahami sebagai suatu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum dan mempunyai manfaat di atas 12 bulan. Fakta mengatakan bahwa konsep aset infrastruktur pada tataran sintaktik sudah dipahami oleh informan, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Tajuddin selaku Pengelola Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU mengatakan bahwa:

“Yah, kan kalau aset itu seperti jalan dan irigasi dan lainnya itu dimasukkan sebagai aset tetap, karena aset itu jangka waktu pemanfaatannya lebih dari satu tahun. Kalau jalan dan irigasi juga kan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan itu semua sudah jelas dalam PSAP”.

Tahapan selanjutnya dari analisis semiotik pada tataran sintaktik adalah melalui pengakuan, pengukuran, dan penyajian elemen-elemen dalam statemen keuangan. Sebelum melakukan tahap pengakuan aset infrastruktur terlebih dahulu diidentifikasi. Pemerintah Kota Makassar mengidentifikasi aset infrastruktur dengan dua cara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya aset infrastruktur itu memang ada yang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum dinas PU itu ada misalnya aset warisan atau jalanan yang dibangun pada saat masa penjajahan dulu. Ada juga aset infrastruktur yang baru didapatkan oleh pemerintah, baik melalui pembelian aset infrastruktur ataupun melalui pembuatan aset infrastruktur yang baru.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah sangat jelas bagaimana pengidentifikasian aset infrastruktur yang dilakukan oleh dinas PU Kota Makassar. Setelah diidentifikasi, Dinas Pekerjaan umum kemudian melakukan klaim (pengakuan) terhadap aset tersebut. Tahapan selanjutnya setelah aset tersebut diakui adalah melakukan pengukuran terhadap aset.

Pengukuran aset infrastruktur yang ada di Dinas PU ada dua, yaitu dengan nilai wajar dan biaya perolehan. Nilai wajar itu sendiri digunakan untuk pengukuran nilai tanah atau aset warisan. Sedangkan, biaya perolehan digunakan untuk pengukuran nilai jalan, irigasi dan jaringan. Setelah dilakukan pengukuran, aset infrastruktur kemudian dicatat dalam laporan keuangan.

Analisis semantik pada aset infrastruktur merupakan nilai dan akun pada aset yang terdapat dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Dinas PU Kota Makassar ditemukan bahwa pemahaman mereka terkait analisis semantik (Penyimbolan) masih sangat kurang. Pemahaman Dinas PU hanya terbatas pada simbol angka dalam laporan keuangan saja, sedangkan dalam teori dijelaskan bahwa simbol itu terbagi atas simbol fisik, angka dan kata. Oleh karena itu, dibawah ini akan dijabarkan mengenai analisis semiotik pada tataran semantik di Dinas PU kota Makassar berdasarkan temuan di lapangan.

Penafsiran informan atas aset infrastruktur pada tataran sintaktik maupun semantik merupakan faktor yang melandasi persepsi informan tentang manfaat informasi aset infrastruktur pada tataran pragmatik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya, artinya apa yang ingin disampaikan penyusun laporan keuangan tersampaikan kepada para pembaca laporan keuangan tersebut. Analisis semiotika pada tataran pragmatik berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penafsiran atas aset infrastruktur sudah bermuara pada pemahaman yang sama, kecuali terjadi perbedaan pada tataran semantik terkait bagaimana metode dalam penentuan penilaian aset itu sendiri. Namun, adakalanya perbedaan terjadi pada aspek pragmatik disebabkan perbedaan pemahaman antara seorang akuntan dengan non-akuntan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dunia dari keduanya. Hal ini seperti dengan pernyataan Fiske (2006) yang menyatakan bahwa perbedaan dalam memahami objek tertentu disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman dalam menilai suatu realitas objek.

Analisis pragmatik pada Dinas PU kota Makassar sudah menunjukkan bahwa informasi yang disajikan sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Pemahaman yang sama antara akuntan dan auditor dalam menilai setiap informasi dalam laporan keuangan pemerintah menjadi suatu indikator berhasilnya penyajian laporan keuangan. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan laporan keuangan kota Makassar yang telah memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Adanya penilaian aset infrastruktur yang tepat dari dinas PU kota Makassar, juga memiliki andil dalam opini audit tersebut. Selain itu, sudah adanya simbol yang tepat dari dinas PU juga menjadi pendukung baiknya pengelolaan laporan keuangan tersebut. Interaksionisme simbolis yang diterapkan tentunya akan mampu mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih akuntabel.

KESIMPULAN

Metode penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum menggunakan metode penilaian biaya perolehan dan nilai wajar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Analisis aset infrastruktur pada tataran sintaktik di Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan teori penyimbolan semiotika. Hal ini dikarenakan aset infrastruktur telah melalui tahapan-tahapan pada analisis sintaktik, sebelum dimasukkan dalam laporan keuangan. Analisis semantik di Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai karena telah menyimbolkan realitas fisik menjadi simbol-simbol statemen keuangan yang dibuktikan dalam laporan keuangan. Analisis pragmatik juga telah sesuai melihat informasi yang disajikan sangat memberikan manfaat bagi para pengguna dan mendukung kewajaran laporan keuangan sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penelitian ini memberikan satu model alternatif dalam menilai aset infrastruktur dengan menggunakan metode biaya perolehan dan nilai wajar tanpa melakukan penilaian terlebih dahulu sehingga ketika tidak memungkinkan baru menilai kembali. Penelitian ini masih berada pada tataran yang berfokus pada satu kota dalam hal ini pada Kota Makassar, sehingga masih banyak data yang kurang untuk menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini juga hanya mengambil data pada Semester I tahun 2022, sehingga penelitian pada tahun yang berbeda tentu akan menghasilkan data yang berbeda pula.

Peneliti berharap Dinas Pekerjaan Umum menginformasikan nilai-nilai yang telah dikeluarkan pada tahap aset sampai pada tahap pelaporan keuangan. Kepada peneliti selanjutnya agar terus mengikuti perkembangan terkait aset infrastruktur karena regulasi terkait begitu dinamis. Selain itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya berfokus pada beberapa kota atau

pada tingkat Provinsi, sehingga mendapatkan data yang lebih banyak lagi agar mendukung kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrei, P., Baker, C. R., & Sargiacomo, M. (2017). Public Sector Accounting in Italy at the Beginning of the 20th Century: The Contributions of Fabio Besta. *Accounting Historians Journal*, 44(1), 35-50. <https://doi.org/10.2308/aahj-10521>
- Aryani Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2018). Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(0), 1-14. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4225>
- Fiske, John (penulis); Yosol Iriantara (penerjemah); Idi Subandy Ibrahim (penerjemah); Idi Subandy Ibrahim (editor). (2018). Cultural and communication studies: sebuah pengantar paling komprehensif/ John Fiske; penerjemah, Drs. Yosol Iriantara, M.S., Idi Subandy Ibrahim; editor, Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta :: Jalasutra,.
- Harahap, Sofyan Syafri. (1994). Akuntansi aktiva tetap : akuntansi, pajak, revaluasi, leasing/ Sofyan Syafri Harahap. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,.
- Iwan Hindawan Dadi, 1953-; Arik Hariyono, 1969-; Murtaji, 1979-; Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. (26 cm). Manajemen properti : tinjauan atas real properti dan aset publik / Iwan Hindawan Dadi, Arik Hariyono, Murtaji ; editor, Tim LPKPAP. Jakarta :: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,.
- Jón R. Blöndal, 2003. "Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent Developments," *OECD Journal on Budgeting*, OECD Publishing, vol. 3(1), pages 43-59.
- K., K., B., B., M., R. P., & R., A. (2005). A method to assess the outcomes of forest product trade on livelihoods and the environment. *A Method to Assess the Outcomes of Forest Product Trade on Livelihoods and the Environment*. <https://doi.org/10.17528/cifor/001937>
- Kirana, P. (n.d.). *Putra-Kirana-090462201271-Akuntansi-2013*. 16.
- Krantz, L. (2001). The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction: Division for Policy and Socio-Economic Analysis. *Division for Policy and Socio-Economic Analysis*, February, 44.
- Kurniati, Evy, Asmony, Dudi Santosa. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8 Nomor 3, 540-558, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Macintosh, N. B., Shearer, T., Thornton, D. B., & Welker, M. (2000). Accounting as simulacrum and hyperreality: perspectives on income and capital. *Accounting, Organizations and Society*, 25(1), 13-50.

- [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(99\)00010-0](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00010-0)
- Masipuang, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (Bkd) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(3), 45–55. <https://doi.org/10.32400/gc.10.3.8444.2015>
- Mattessich, R. (2003). Accounting representation and the onion model of reality: a comparison with Baudrillard's orders of simulacra and his hyperreality. *Accounting, Organizations and Society*, 28(5), 443–470. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(02\)00024-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(02)00024-7)
- Mayangsari, Anisa Putra & Yayuk Nurjanah. (2018). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 6 Nomor 3, 195-204.
- Punusingon, Natalia dan Harijanto Sabijono. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13(4), 804-810.
- Rahman, M. H., & Wideasanti, I. (2019). Analisa Pelaksanaan Manajemen Aset Infrastruktur Gedung Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta. *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 8(2), 156–168. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa/article/view/1401/1024>
- Rosiana, E., & Tianna Solovida, G. T. (2012). Analisis Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis Dalam Penilaian Aset Biologis Pada Perusahaan Agrikultur. *Universitas Lampung*, 1, 1–28.
- Wilestari, Median & Wiwi Afriani (2019). Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1, 1-14.
- Yuliati, A. M. G. I. (2015). Analisis Fenomena Expectation Gap Dan Tanggung Jawab Hukum Auditor (Studi Pada Kap "Mh & N" Di Jakarta). *Iqtishadia: Jurnal Kaji Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 329–354.